

# Dari Medan Perang Berburu Lapangan Pekerjaan: Pengangguran Revolusi di Yogyakarta Tahun 1950-an

**RIKA INGGIT ASMAWATI**

Universitas Gadjah Mada

## Abstract

This research discusses about the social economic history of Yogyakarta during 1950s. The main problem is to analyze how the newly independent country of Indonesia dealt with unemployment after the revolutionary period. This research employs the historical method using primary and secondary sources, such as archives, newspapers, magazines, interviews, and reviews of relevant references. There are four conclusions in this research. First, although the period was called as the period of creating jobs, the unemployment number in early 1950s was increasing. Second, this unemployment problem was not primarily caused by the economic condition but also by demographic problems and the legacies from the Revolution Era. Third, people who were categorized as unemployed were not only labors, but also veterans. Fourth, for the government, solving this unemployment problem was the effort to create economic improvement for its society.

**Keywords:**  
unemployment;  
Yogyakarta;  
labour

## Abstrak

Tulisan ini menggambarkan sejarah sosial-ekonomi kehidupan masyarakat Yogyakarta tahun 1950-an. Permasalahan utama ialah memaparkan sejauh mana negara yang baru merdeka menangani pengangguran revolusi yang muncul setelah perang kemerdekaan. Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang muncul, dipakai metode sejarah serta penggunaan sumber primer dan sekunder seperti surat kabar, arsip, sumber lisan, dan beberapa referensi yang relevan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah; *pertama*, walaupun pada masa itu kerap disebut sebagai masa pekerjaan mencari orang, namun angka pengangguran di awal tahun 1950-an justru meningkat; *kedua*, pengangguran yang terjadi pada tahun 1950-an ternyata bukan hanya disebabkan karena kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan pada tahun 1950-an namun juga disebabkan karena masalah penduduk dan warisan masalah pada masa revolusi; *ketiga*, orang-orang yang menganggur terdiri bukan hanya dari lapisan buruh saja, namun meliputi mantan pejuang kemerdekaan; dan *keempat*, bagi pemerintah, menyelesaikan masalah pengangguran ialah wujud upaya menciptakan perbaikan ekonomi bagi warganya.

**Kata kunci:**  
pengangguran;  
Yogyakarta;  
tenaga kerja

## Pengantar

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Indonesia sebagai negara baru merdeka adalah bagaimana “bisa memberikan pelayanan” bagi segenap rakyat tanpa memandang perbedaan ras. Pelayanan tanpa politik segregasi rasial, secara ideal menjadi garis pembeda antara kondisi masyarakat di bawah kuasa kolonial dan dalam suasana kemerdekaan. Hal ini juga menjadi indikator derajat kesejahteraan yang bisa dinikmati oleh masyarakat merdeka—yang tidak dapat dirasakan pada masa kolonial.

Di sisi lain, upaya menciptakan kesejahteraan bagi negara baru merdeka sama sekali bukan perkara mudah. Terutama dipengaruhi oleh kondisi politik Indonesia pada rentang waktu 1945-1949 yang masih belum stabil. Sebagai akibatnya, timbul kondisi sosial yang kurang menguntungkan; dalam kasus ini pemerintah Indonesia menghadapi masalah pengangguran, terutama sekali di Jawa; bekas hegemoni politik dan monopoli ekonomi kolonial berpusat. Menariknya, fenomena pengangguran justru mengemuka tatkala Indonesia baru saja merdeka, yang mana pada saat itu seharusnya makin banyak kursi jabatan, pos-pos pekerjaan, serta celah lain yang dapat diisi.

Sebagai sebuah fenomena nasional, ihwal pengangguran berakar sekaligus berimbas di tingkat lokal. Pengangguran yang terjadi pada tahun 1950-an di Yogyakarta masih erat hubungannya dengan perjalanan wilayah ini pada periode sebelumnya, yakni statusnya sebagai eks-ibu kota negara pada masa revolusi. Tulisan ini hendak mengkaji sebab dari munculnya pengangguran revolusi di Yogyakarta, pengertian pengangguran revolusi, klasifikasi golongan penganggur, serta tindakan dari pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi permasalahan ini.

Beberapa sejarawan telah menulis topik pengangguran, namun kajian mereka sebatas pada periode kolonial terutama terkait dengan depresi tahun 1930-an. Dapat dikatakan bahwa kajian sejarah yang mengungkap tema pengangguran khususnya masa revolusi, masih jarang dieksplorasi. Sementara karya sejarah perihal Yogyakarta masa revolusi lebih didominasi tema-tema kultur urban, politik, militer, ekonomi, kekerasan, dan sosial. Sisi sosial-ekonomi tahun 1950-an sebagai hasil dari periode perang revolusi—yang dirasakan oleh mantan pejuang, buruh-buruh dari pabrik yang dibumihanguskan, hingga para pengungsi dan penyintas perang—akan disusun dalam tema pengangguran revolusi. Republik Indonesia yang masih sangat muda ditantang untuk mewujudkan negara kesejahteraan, *gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja*, dan tujuan tulisan ini adalah menarasikan ambisi tersebut.

## Pengangguran Revolusi

Perang boleh saja berakhir namun dampaknya masih tetap terasa pada

kehidupan secara personal maupun komunal. Perang Revolusi dikatakan puna di tahun 1949—ditandai dengan pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintah Indonesia. Akan tetapi, dampak perang yang terjadi segera setelah suramnya pendudukan militer Jepang, masih berbekas setidaknya hingga periode 1950-an. Pada masa tersebut, banyak orang mencari pekerjaan, mulai dari mantan pejuang, mantan pejabat negara, mantan pegawai lembaga pendidikan, buruh hingga petani. Besarnya pengangguran tidak dapat diketahui secara pasti, tetapi selama Revolusi ratusan hingga ribuan orang meninggalkan pekerjaannya karena perang. Sebagian dari mereka ikut perang gerilya sedangkan sebagian yang lain mengungsi ke tempat yang aman. Tatkala perang berakhir, sebagian besar dari mereka tidak lagi memiliki pekerjaan yang tetap dan harus memulai kembali usaha perekonomiannya dari awal.

Pengangguran Revolusi adalah pengangguran yang terjadi sebagai dampak adanya peperangan dan ketidakstabilan negara di masa Revolusi. Para penganggur ini dulunya memiliki profesi tertentu, baik sebagai tenaga kerja tetap hingga tenaga serabutan, baik buruh kasar di kota-kota maupun para petani di pedesaan. Setelah perang berakhir, mereka yang ikut berjuang lazimnya mendapatkan penghargaan sosial, bahkan dielu-elukan sebagai pahlawan. Hal ini turut membuka kesempatan mereka untuk menduduki bangku-bangku sekolah atau mendapatkan pekerjaan dengan status lebih baik daripada sebelum mereka menjadi pejuang. Namun, di antara mereka ini ada yang mengalami nasib yang kurang beruntung. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, sebagian dari mereka yang kurang beruntung ini justru menganggur.

Bagi negara yang baru saja *mentas perang* (selesai perang), masalah mantan pejuang menjadi salah satu perhatian pemerintah. Hal ini dilatarbelakangi selama masa Revolusi ratusan orang berpartisipasi dalam peperangan yang membuat mereka menjadi pahlawan negara. Selain itu, kepentingan otoritas pemerintah ialah tegaknya *rust en orde*; yang mana mantan pejuang diposisikan sebagai pihak pro aktif penjaga stabilitas ketertiban dan keamanan. Meskipun ada kalanya eks-pejuang justru dinilai berpotensi menciptakan kekacauan dan pemberontakan.

Saat perang berkecamuk, kelompok sipil menggabungkan diri dalam kelaskaran atau angkatan perang dengan sukarela, dan tidak sedikit dari mereka merasa terhormat jika tetap tergabung dalam kelompok-kelompok angkatan perang. Paska perang, sebagian di antara mantan pejuang ini masuk ke dalam ketentaraan, kendati syarat untuk masuk ke tentara sebenarnya tidak harus berasal dari mantan pejuang. Prioritas memang berlaku bagi mantan pejuang yang mendaftar sebagai tentara profesional; lebih-lebih jika mereka memiliki senjata sebagai bukti alat perjuangan masa Revolusi, maka akan ditawarkan jabatan istimewa.

Namun tidak semua mantan pejuang ini lantas menjadi tentara. Selain karena minat kembali sebagai warga sipil, para mantan pejuang memang tidak semuanya dapat ditampung sebagai angkatan perang. Kebutuhan angkatan perang di Indonesia pada awal 1950-an tidak sebesar ketika perang menghebat pada masa Revolusi. Oleh karenanya sebagian dari mereka didemobilisasikan, terutama yang tidak memenuhi persyaratan angkatan perang profesional.

Pengurangan jumlah angkatan perang ini terjadi sejak tahun 1947, ketika Biro Perdjjuangan dibubarkan dan 120.000 orang “dikembalikan ke masyarakat”, disusul 60.000 hingga 80.000 prajurit yang dirasionalisir dari ketentaraan. Kekhawatiran di dalam situasi ini terimajinasikan dalam novel *Para Priyayi* karya Umar Khayam. Dikisahkan tokoh Noegroho, alumnus PETA serta mantan pejuang perang Revolusi berpangkat letnan kolonel yang dilanda kekhawatiran seiring berakhirnya perang. Ia beruntung tidak dipecat dari ketentaraan dan hanya turun pangkat menjadi mayor.

Di wilayah Yogyakarta pada tahun 1950-an, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh pihak panitia rekonstruksi, setidaknya terdapat kurang lebih 4.000 orang mantan pejuang kemerdekaan yang masih membutuhkan pertolongan dalam hal peningkatan kesejahteraan hidup dan keluarga. Kelompok ini, ditambah dengan masyarakat sipil yang terkena imbas perang secara langsung—seperti buruh yang kehilangan pekerjaan serta para pengungsi yang masuk mencari suaka ke Yogyakarta—merupakan kategori masyarakat yang diidentifikasi sebagai pengangguran revolusi di dalam tulisan ini.

### **Buruh dan Ancaman *Massa Ontslag***

Selain terdiri dari mantan pejuang kemerdekaan, pengangguran tahun 1950-an juga terdiri dari kaum buruh. Pada medio ini, perusahaan-perusahaan kecil yang ada di Yogyakarta terancam gulung tikar, seperti perusahaan batik, rokok, timbangan, perak, tenun, dan lain-lain. Hal ini disebabkan antara lain karena bahan baku yang sukar dicari, jikapun sudah ditemukan, harganya melambung tinggi, belum lagi kesulitan mencari pasar serta minimnya bantuan dari pemerintah.

Lesunya kehidupan dalam dunia usaha memicu terjadinya pemberhentian buruh secara besar-besaran di pelbagai daerah pada tahun 1950-an. Meskipun pemerintah belum merasa perlu mengupayakan diundangkannya peraturan perihal sistem larangan pemberhentian buruh secara serentak (*massa ontslag*), sebagai gantinya menganjurkan agar tiap pengusaha yang hendak memberhentikan buruh lebih dari sepuluh orang secara serentak, wajib untuk terlebih dahulu melakukan perundingan dengan instansi pemerintah, dalam hal ini Jawatan Penempatan Tenaga.

Sebelum Agresi Militer II berkobar, terdapat banyak pabrik gula, tembakau dan pertambangan di wilayah Yogyakarta yang berada di bawah

kuasa modal asing. Seiring politik bumi hangus, pabrik-pabrik tersebut ikut dihancurkan. Sementara sebagian besar petani di Yogyakarta adalah buruh perkebunan, yang mana saat pabrik-pabrik asing tersebut belum dihancurkan, pekerjaan menjadi buruh adalah salah satu pilihan pekerjaan yang mendatangkan penghasilan bagi masyarakat.

Membludaknya jumlah pengangguran sebagai akibat dari politik bumi hangus terjadi karena sejak awal abad ke-20, ketujuhbelas pabrik gula telah mengupah banyak sekali petani lokal dan migran. Di masanya, pemerintah kolonial telah memperkenalkan ekonomi uang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Lebih dari 80%, lahan pertanian yang menggunakan sistem irigasi diubah menjadi areal perkebunan, dan lebih dari 15.000 orang terlibat sebagai tenaga kerja permanen maupun musiman. Saat Perang Revolusi berkecamuk, terutama di tahun 1949, 17 pabrik gula tersebut rusak parah dan mengakibatkan lenyapnya mata pencaharian buruh.

Pada tahun 1951, sebanyak 4.708 buruh yang bekerja dalam bidang perkebunan diberhentikan. Jumlah ini belum termasuk 114 orang buruh dari perusahaan lain di luar perkebunan yang juga diberhentikan. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, pemberhentian buruh serentak di Yogyakarta lebih sedikit jumlahnya. Hal ini karena mata pencaharian utama masyarakat Yogyakarta adalah di bidang pertanian. Namun mengingat daerah Yogyakarta adalah daerah yang sempit dan tidak memiliki terlalu banyak jenis pekerjaan yang ditawarkan, maka pemberhentian buruh ikut mempengaruhi dinamika pengangguran di Yogyakarta.

Pada Oktober 1951, sebuah perusahaan swasta Belanda mengungkapkan suatu permintaan untuk membangun kembali pabrik gulanya yang hancur di daerah Bantul Selatan. Pemerintah Yogyakarta menanggapi dengan mengajukan 11 syarat perijinan usaha pabrik gula yang cukup sulit dipenuhi. Akibatnya, tidak terjadi kesepakatan perihal rencana pendirian kembali pabrik gula tersebut.

Pada tahun 1952, sebuah sidang pleno diselenggarakan oleh Sentral Buruh Tekstil Yogyakarta. Adapun pertemuan tersebut membahas peningkatan jumlah pengangguran di kalangan mereka seiring dengan penutupan perusahaan-perusahaan tekstil. Menurut hasil sidang, penutupan perusahaan-perusahaan tekstil nasional sebagai akibat dari politik ekonomi pemerintah yang memberi keleluasaan terhadap modal besar asing dengan tidak memberikan pembatasan impor terhadap bahan tekstil jadi serta tidak adanya pembatasan harga barang-barang tekstil mentah seperti benang; akibatnya perusahaan-perusahaan tekstil yang tidak mampu lagi menyaingi harga barang-barang impor terpaksa tutup. Selain karena terkendala persaingan harga produksi, industri tekstil wilayah Yogyakarta juga harus menghadapi kekurangan pasokan listrik. Hal ini turut menghambat produksi tekstil pabrik-pabrik di Yogyakarta.

*Massa Ontslag* terjadi lagi di tahun 1957, sebanyak 6000-an buruh diberhentikan karena berbagai alasan.

No.	Sektor Perusahaan	Jumlah Perusahaan		Jumlah Buruh	
		Th 1957	Th 1958	Th 1957	Th 1958
1	Pertanian, Peternakan, kehutanan, perburuhan dan perikanan	42	40	210	152
2	Pertambangan/penggalian	1	2	285	94
3	Industri	1.123	1.080	20.481	19.060
4	Bangunan	13	12	3.616	1.754
5	Listrik, gas, air, uap	2	3	135	154
6	Perdagangan, Bank, Perusahaan pertanggung	604	594	2.619	2.310
7	Jasa-jasa	710	425	7.018	29.311
8	Pengangkutan, Penimbunan, Perhubungan	108	108	961	1.153
	Jumlah	2.603	2.264	35.325	29.311

**Tabel 1.**  
**Data Perusahaan dan Jumlah Buruh Jogjakarta dalam Tahun 1957 dan 1958.**

Sumber: *Statistik Pemerintahan Daerah Jogjakarta 1958.*

Pada tahun 1958, jumlah perusahaan berkurang jika dibandingkan dengan tahun 1957. Harga bahan baku yang selalu meningkat dan banyaknya buruh yang meminta dinaikkan upahnya, memaksa perusahaan-perusahaan gulung tikar, akibatnya buruhnya diberhentikan.

### Arus Pengungsi dan Lonjakan Penduduk

Perang dipercayai Malthus sebagai salah satu faktor yang dapat menekan laju pertumbuhan penduduk, namun hal ini tidak terjadi di Yogyakarta pada masa Revolusi. Pertambahan penduduk Yogyakarta justru mencolok manakala Yogyakarta dijadikan salah satu daerah tujuan pengungsi pada saat Revolusi Kemerdekaan. Sementara Fryer berpendapat bahwa laju pertumbuhan penduduk di Yogyakarta adalah ganjil. Yogyakarta kehilangan banyak penduduk pada saat Revolusi, namun pada tahun 1950-an, laju penduduk di Yogyakarta meningkat. Populasi di Jawa pada saat itu yang sudah mulai padat mengakibatkan menurunnya standar hidup masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari gejala maraknya kriminalitas yang terjadi di Yogyakarta pada periode Revolusi.

Menurut data statistik, penduduk Kasultanan Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 1944 berjumlah 1.848.814 jiwa. Angka ini kemudian berubah secara signifikan beberapa tahun kemudian. Hal ini dimungkinkan karena selama

menjadi ibukota RI, Yogyakarta menjadi tujuan pengungsi. Kondisi Jakarta yang semakin tidak aman serta tindakan-tindakan militer yang dilakukan sekutu dan Belanda di daerah pendudukan menimbulkan gelombang pengungsi menuju daerah yang lebih aman. Pada awal 1946, Yogyakarta harus menampung 40.000 hingga 50.000 pengungsi. Arsip lain menunjukkan bahwa sampai pada tanggal 15 Januari 1948, jumlah pengungsi yang berada di Yogyakarta mencapai 38.740 orang. Jumlah ini terdiri dari 29.888 orang Indonesia, dan 8.852 orang bangsa lain. Pengungsi ini berasal dari berbagai macam daerah.

Sebuah arsip perang menggambarkan bahwa buruh yang mengungsi tidak mempunyai pekerjaan di daerah evakuasi, sementara para perempuan terpisah dari suaminya. Terdapat jenis-jenis pekerjaan sebelum para pengungsi melakukan hijrah ke Yogyakarta seperti petani, buruh, pegawai, pensiunan pegawai, pedagang, pelukis, dan ada pula beberapa pengungsi yang tidak memiliki pekerjaan.

Biro Kabinet Urusan Daerah Pendudukan pada 17 Februari 1948 memutuskan, dengan menimbang kondisi kepadatan penduduk Yogyakarta serta masih diperlukannya suara dan dukungan masyarakat termasuk pengungsi agar tetap pro republik, maka diputuskan untuk melakukan pengembalian pengungsi yang difokuskan bagi pengungsi warga negara Indonesia. Bulan Mei 1948, ribuan pengungsi mulai dikembalikan ke daerah asal di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur, sementara 147 orang dikembalikan ke Jawa Barat. Usaha ini sejatinya belum dapat dikatakan berhasil, sebab lebih dari separuh pengungsi tidak mendaftarkan diri dalam proses pengembalian ini. Terlepas dari hal itu, mereka yang menetap di Yogyakarta ini, lantas turut mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Yogyakarta pada tahun 1950-an. Berikut tabel pertumbuhan penduduk di Yogyakarta:

No.	Tahun	Penduduk Yogyakarta	Permintaan Tenaga
1	1953	1.941.311	1.106
2	1954	1.982.517	1.076
3	1955	2.018.750	578
4	1956	2.048.838	482
5	1957	2.083.039	320
6	1958	2.127.384	344
7	1959	2.172.474	674

**Tabel 2. Pertumbuhan penduduk Yogyakarta.**

Sumber: *Statistik Pemerintah Daerah Jogjakarta 1962*

## Menyelesaikan Masalah Pengangguran: Pembentukan Jawatan Tenaga Kerja

Untuk memudahkan pemerintah dalam pemberian pelayanan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan buruh, didirikan Jawatan Sosial Bagian Perburuhan pada bulan April 1946 di Yogyakarta. Tugas awal dari jawatan ini adalah mengurus buruh terlantar—yang biasa disebut *kere*— dan tidak memiliki tempat tinggal serta bersarang di sepanjang Jalan Malioboro tiap malam harinya. Buruh-buruh terlantar ini kemudian dibuatkan sebuah asrama yang terletak di sebelah utara Jembatan Code (*Ledok Tjode*).

Tidak hanya tempat untuk menginap, jawatan ini juga bertugas untuk menyalurkan pekerjaan, terutama berlaku bagi mereka yang mampu membaca dan menulis. Jenis pekerjaan yang dicarikan misalnya: pesuruh kantor, jongos, dagang, kusir, dan angkringan. Dari pekerjaan tersebut, mereka menghasilkan rata-rata Rp 3 hingga Rp 5 sehari.

Jawatan ini mempunyai tugas yang berhubungan dengan hal “antar kerja” yang biasa disebut kantor penempatan tenaga. Sebelum terjadinya *clash*, jawatan cabang Yogyakarta tersebut hanya bergerak dalam bidang pendataan para penganggur dari semua lapangan, baik yang mempunyai keterampilan ataupun yang tidak memiliki keahlian sama sekali, menghubungkan penganggur-penganggur dengan calon majikan, serta menerima permintaan tenaga atau lowongan secara langsung dari para majikan atau tidak langsung misalnya dari surat kabar. Dengan adanya acuan yang terdapat pada lowongan tersebut, maka Jawatan Sosial Bagian Perburuhan dapat menyeleksi penganggur untuk kemudian dicarikan pekerjaan yang pas sesuai dengan kualifikasi. Dalam perkembangannya, Jawatan Sosial Bagian Perburuhan ini, bertransformasi menjadi Jawatan Perburuhan yang setingkat dengan Jawatan Sosial. Sejak saat itulah Jawatan Perburuhan berdiri sendiri dan masalah pengangguran diurus oleh jawatan ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan No. 3 tahun 1950, terdapat Jawatan Penempatan Tenaga yang berada di bawah Kementerian Perburuhan, yang mempunyai tugas yang hampir sama dengan Jawatan Penempatan Tenaga sebelumnya. Tugas yang diemban oleh jawatan yang terdapat di setiap keresidenan ini adalah berusaha memetakan kebutuhan kerja di Indonesia beserta tenaga kerja yang tersedia. Bagian “Antarkerdja/Kerdjaantara” yang berada dalam jawatan ini bertugas untuk menyelenggarakan pencatatan tenaga, menyelenggarakan penempatan tenaga, mengusahakan lapangan pekerjaan yang baru, mengusahakan pekerjaan bagi para penganggur yang mendaftarkan diri di Jawatan Penempatan Tenaga, mengusahakan latihan kerja serta menyelenggarakan pemberian sokongan kesejahteraan dan usaha sosial kepada kaum penganggur. Seorang penganggur yang telah

mendaftarkan diri di kantor Penempatan Tenaga, kemudian ketika dipanggil kantor Penempatan Tenaga untuk disalurkan ke pekerjaan tertentu tidak merespon selama jangka waktu 3 bulan, maka status penganggurannya akan dihapuskan dan penganggur tersebut dianggap telah memiliki pekerjaan.

Pegawai “Antarkerdja” harus benar-benar mengetahui pekerjaan atau jabatan yang sekiranya sesuai dengan kecakapan dan bakat orang yang mencari pekerjaan. Dalam menjalankan tugasnya, pegawai melakukan *interview* kepada calon pencari kerja sehingga pegawai tersebut harus bisa menyelami jiwa dan kecakapan pencari kerja.

Pada bulan Januari tahun 1951, berhubungan dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membawa konsekuensi berubahnya segala bentuk administrasi pemerintahan, Menteri Perburuhan melakukan penyempurnaan dan menambah adanya kantor perwakilan Jawatan Penempatan Tenaga dan Kantor-kantor Penempatan Tenaga di tempat-tempat tertentu, termasuk di Yogyakarta yang meliputi wilayah keseluruhan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada bulan September 1951, kantor penempatan kerja di Yogyakarta ini dipindahkan di kantor penempatan kerja pusat di Jakarta karena dianggap telah selesai melakukan kewajibannya. Namun, pada tahun 1952, didirikan lagi Kantor Penempatan Tenaga di Yogyakarta.

Dengan pendirian kantor-kantor penempatan kerja di berbagai daerah, pemerintah berharap agar masyarakat semakin mudah mencari informasi atau lembaga penyalur tenaga kerja; sehingga membantu mengatasi permasalahan pengangguran. Sampai dengan bulan Maret 1950, sebanyak 16.126 orang penganggur mendaftarkan diri ke kantor Penempatan Kerja Yogyakarta. Dari jumlah tersebut, 628 orang telah ditempatkan sedangkan 14.046 orang mendapatkan sokongan, dan menyita anggaran sebesar f. 203.205.

Selain menghimbau kepada masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan agar mencatatkan diri di Kantor Penempatan Kerja, pemerintah juga meminta pihak swasta untuk mendapatkan tenaga kerja melalui perantara kantor penyalur tenaga kerja. Meskipun telah dirancang sedemikian rupa, sering kali pihak swasta bahkan pemerintah sendiri enggan mempergunakan jasa Jawatan Tenaga Kerja dalam mencari tenaga kerja. Situasi seperti ini sudah dapat dilihat pada awal tahun 1950-an, saat itu keberadaan jawatan terutama menyangkut fungsinya, masih belum disadari oleh masyarakat. Masyarakat lebih suka untuk mencari pekerjaan berdasarkan informasi kerabat. Sementara bagi mantan pejuang kemerdekaan, biasanya mencari kerja berdasarkan informasi dari pimpinannya.

Kesulitan untuk menempatkan tenaga penganggur di Yogyakarta juga muncul dari kalangan penganggur itu sendiri. Hal ini dilatarbelakangi Yogyakarta termasuk wilayah yang sedikit peluang kerjanya, maka penganggur

dicarikan pekerjaan di luar wilayah Yogyakarta, meskipun sebagian penganggur menolak karena masih ingin bertempat tinggal di Yogyakarta. Penolakan ini berpangkal dari masalah belum adanya jaminan perumahan serta besaran gaji yang ditawarkan jika penganggur mau menerima tawaran pekerjaan di luar Yogyakarta. Kesulitan untuk mencarikan pekerjaan juga muncul karena tidak semua pengangguran memiliki keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan darurat, bahkan ada sebagian penganggur yang sama sekali tidak memiliki keterampilan apapun. Bagi orang yang menganggur, mengantungkan lowongan pekerjaan dari Jawatan Tenaga Kerja semata ibarat *harapan djadi kaja karena lotre*.

Selain berusaha untuk mencarikan pekerjaan bagi penganggur, Jawatan Tenaga Kerja juga memberikan bantuan pinjaman modal, agar iklim pengusaha atau iklim industri bisa muncul di Yogyakarta. Sampai dengan bulan Maret 1950, Jawatan Penempatan Tenaga telah memberikan bantuan pinjaman modal kepada 21 perusahaan di Yogyakarta sebesar Rp 111.850 Sementara pada tahun 1951, hanya terdapat 4 buah perusahaan yang diberikan pinjaman sebesar Rp 60.000.

### **Sokongan Penganggur**

Sokongan penganggur merupakan tunjangan yang diberikan kepada mereka yang tidak memiliki pekerjaan, yakni mereka yang tanpa kesalahan dan di luar keinginan mereka kehilangan pekerjaan. Buruh serabutan yang tidak tentu pekerjaannya tidak dapat diberikan sokongan. Pelajar yang baru saja lulus dan baru mencari pekerjaan selama kurang dari setahun juga tidak diberikan sokongan. Apabila lebih dari itu mereka belum juga mendapatkan pekerjaan, sementara berposisi sebagai kepala keluarga atau memikul beban untuk memenuhi sebagian besar keperluan hidup keluarganya, maka ia boleh mendapatkan sokongan. Syarat pokok bagi penerima sokongan ialah mereka yang sebelum menganggur memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan dipandang pula membutuhkan sokongan.

Menurut Penjelasan Peraturan Menteri Perburuhan Republik Indonesia No.7 tahun 1950 tentang pengubahan peraturan pengangguran sementara, dijelaskan bahwa sokongan penganggur seharusnya dapat mencukupi kebutuhan hidup penganggur. Namun, terdapat dikhawatirkan adanya sokongan penganggur ini justru dapat memanjakan hingga menjadikan penganggur malas mencari pekerjaan. Oleh karenanya, besaran sokongan yang akan diberikan adalah sepertiga dari jumlah minimum kebutuhan hidupnya.

Batasan usia juga diatur bagi para penganggur yang mengajukan sokongan, yakni maksimal enam puluh tahun, mampu dan berhasrat untuk bekerja namun tidak mendapat kesempatan untuk bekerja serta telah mendaftarkan diri sebagai pencari kerja pada Kantor Penempatan Tenaga.

Selain itu juga diatur durasi pemberian sokongan penganggur hanya selama tiga bulan. Sokongan dicabut jika penganggur menolak suatu pekerjaan yang telah dicarikan Jawatan Penempatan Kerja.

Besaran nominal sokongan penganggur ini berbeda antara kota besar dan kota kecil. Mereka yang tinggal di Jakarta-Raya, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Padang, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makasar, Menado, Ambon, Yogyakarta dan Surakarta mendapat sokongan sebanyak-banyaknya Rp 30 untuk diri sendiri, Rp 15 untuk istri atau suaminya, Rp 5 untuk tiap-tiap anggota keluarga lainnya dengan maximum Rp 60 sebulan. Sedangkan mereka yang bertempat tinggal di luar kota-kota tersebut mendapat sebanyak-banyaknya Rp 20 untuk diri sendiri, Rp 10 untuk isteri atau suaminya, Rp 5 untuk tiap-tiap anggota keluarga lainnya dengan maksimum Rp 45 sebulan.

Sejak bulan September 1949 hingga September 1951, sebanyak 10.781 orang penganggur di Yogyakarta telah mendapatkan sokongan kesejahteraan, yang menelan biaya sebesar Rp 470.395. Rinciannya, sebanyak 4.477 penganggur mendapatkan sokongan A dengan menghabiskan dana Rp 104.141, sisanya mendapatkan sokongan B. Penganggur yang mendaftarkan diri di Jawatan Penempatan Tenaga juga dicarikan pekerjaan. Medio September 1949 hingga September 1951, beberapa dari penganggur Yogyakarta telah ditempatkan di beberapa instansi negara seperti kantor-kantor pemerintah, sekolah-sekolah, serta diikutkan dalam kursus-kursus yang diadakan oleh pemerintah.

Sokongan A diberikan kepada penganggur yang dianggap pantas mendapatkan sokongan sesuai dengan syarat-syarat tertentu, sementara sokongan B diberikan kepada para penganggur yang menjalani latihan kerja dan kerja darurat. Besaran sokongan A tidak boleh lebih dari Rp 22,50 untuk tiap-tiap keluarga yang berada di kota besar, termasuk Yogyakarta, sedangkan mereka yang berada di kota kecil, tidak boleh melebihi Rp 30. Sokongan A dianggap hanyalah sebagai "uang penghibur" karena besarnya uang sokongan penganggur ini hanyalah mampu menutupi sepertiga dari kebutuhan hidup penganggur, sedangkan pemberian sokongan B dimaksudkan sebagai upah atas pekerjaan yang mereka lakukan sehingga mereka bisa memenuhi semua keperluan hidupnya. Namun tidak seluruh penganggur yang telah mendaftarkan diri di Jawatan Penempatan Tenaga memenuhi syarat guna mendapatkan sokongan.

Jika melihat besarnya sokongan penganggur A yang hanya bisa memenuhi sepertiga dari kebutuhan hidup penganggur, muncul wacana untuk menaikkan besarnya sokongan penganggur, namun hal ini urung dilakukan. Alih-alih dinaikkan, justru pada tahun 1958, sokongan penganggur—khususnya golongan A—dipremorikan. Hal ini dilakukan karena berbagai hal, pemerintah beranggapan bahwa besarnya dana yang

dikururkan untuk melaksanakan kebijakan ini tidak dapat diprediksi dengan pasti. Dalam lingkup nasional, ketidakmampuan negara untuk memberikan sokongan penganggur secara kontinyu dikarenakan pada saat itu, negara sedang mengalami masalah keuangan. Hal ini berhubungan dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda dan pemberontakan bersenjata di beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi Utara yang amat membebani keuangan pemerintah.

Berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Kementerian Perburuhan mengenai urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur di Daerah Istimewa Yogyakarta, sokongan penganggur diganti dengan biaya dan kesejahteraan dan perbaikan nasib buruh serta usaha-usaha pemberian kerja kepada penganggur. Dana kesejahteraan buruh ini dialokasikan untuk pendirian dan pengelolaan Balai Istirahat Buruh di Kaliurang.

### **Mantan Pejuang**

Di Yogyakarta, sejak bulan Desember 1950 sudah berdiri asrama yang digunakan untuk menampung mantan pejuang. Gedung asrama itu dulunya merupakan gedung milik Kementerian Sosial yang berada di Jalan besar Jogja-Solo di sekitar lapangan yang biasa digunakan untuk pacuan kuda. Menurut pimpinan asrama tersebut, Surodjo Budikardejo, pada awalnya asrama tersebut menampung 213 orang yang berasal dari berbagai tempat.

Pada Desember 1950, sebanyak 22 orang pemuda yang ditampung dalam asrama tersebut diterima dalam ujian calon polisi. Kemudian pada bulan Januari 1951, sebanyak 29 pemuda yang diterima sebagai calon anggota polisi. Sementara itu beberapa di antara mereka ada yang ingin kembali ke dalam masyarakat, dengan demikian sampai dengan bulan Maret 1951 terdapat 104 orang mantan pejuang yang masih tinggal. 104 orang tersebut menunggu untuk diberangkatkan ke Palembang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan pemerintah. Berselang cukup lama, janji pemerintah tersebut tidak kunjung dilaksanakan. Menanggapinya sebanyak 3 orang mantan pejuang mendaftar ke C.T.N (Corps Tjadangan Negara) dan dimasukkan dalam asrama Gembongan Solo.

Selama berada di dalam asrama, mereka mendapatkan jaminan makan dan perawatan kesehatan. Untuk uang makan harian setiap orang disediakan Rp 3 untuk 3 kali makan. Pemilihan bahan makanannya pun disesuaikan atas saran dokter sehingga pemenuhan gizi mantan pejuang tersebut dapat dijamin. Setiap hari, pegawai kesehatan Jawatan Kota memantau kondisi mantan pejuang, jika ada yang sakit dan perlu mendapatkan perawatan medis akan segera dikirim ke Rumah Sakit Bethesda dengan biaya dari asrama. Di dalam asrama, mereka mendapat uang saku Rp 1 sehari. Mulai bulan Maret, mereka juga diberi sokongan tunjangan keluarga dengan

perhitungan untuk ayah sebesar Rp 30; ibu sebesar Rp 15, isteri sebesar Rp 30; dan anak sebesar Rp 7,50 per orang. Dana ini dibagikan dengan ketentuan sekurang-kurangnya Rp 30 dan sebanyak-banyaknya Rp 70 per keluarga selama sebulan. Setidaknya pemerintah telah menghabiskan kurang lebih Rp 100.000 untuk membiayai program ini.

Selain tunjangan hidup, para mantan pejuang juga mendapatkan pelajaran kesehatan dan pelajaran sosial yang diselenggarakan masing-masing dua kali seminggu. Semula, terdapat rencana untuk melibatkan mereka ke dalam usaha pengolahan tanah. Pihak asrama pun sudah menyediakan cangkul, namun rencana ini urung dilakukan karena mereka menyatakan “tidak biasa” dengan pekerjaan semacam ini. Sebagai pekerjaan sambilan, mereka diberi pelajaran melinting rokok dengan alat gilingan. Penghasilan dari pekerjaan ini dapat dinikmati mereka sendiri.

Meski sudah cukup terstruktur, asrama ini sifatnya sementara saja sebelum ada keputusan dari pemerintah mengenai jaminan kesejahteraan kehidupan mantan pejuang. Seluruh biaya untuk menanggung semua kehidupan sehari-hari di asrama ditanggung oleh Kementerian Sosial Jakarta. Namun karena pada saat itu Kementerian Sosial Jakarta sedang mengalami masalah keuangan, maka Jawatan Sosial bagian Kemasjarakatan harus meminjam kepada pemerintah daerah.

Sebagai mantan pejuang yang turut serta dalam mempertahankan kemerdekaan, hal-hal yang pertama kali diperhatikan negara ialah memberikan jaminan kesejahteraan hidup. Permasalahan ini kemudian dipecahkan dengan jalan memberi kemudahan dalam mencari pekerjaan terutama di bidang ketentaraan dan pemerintahan. Secara umum negara memberikan kesempatan kepada mantan pejuang dengan belajar di bangku sekolah dengan mendapatkan tunjangan ikatan dinas. Mayoritas dari mereka belajar di sekolah lanjutan dan sekolah tinggi.

Mantan pejuang yang mendapat prioritas kesempatan untuk ditempatkan dalam masyarakat kerja adalah golongan pelajar demobilisan yang ikut berperang paling sedikit 2 periode *clash*. Untuk Pulau Jawa, periode itu terhitung mulai 21 Juli 1947. Selain itu, yang termasuk dalam golongan ini adalah mereka yang tergabung dalam ketentaraan sejak tahun 1945. Usia mereka berada pada 22-26 tahun dan sebagian besar bertempat tinggal di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Medan dan Makasar.

Permasalahan kembali muncul saat para mantan pejuang yang sebelumnya terbiasa menjalani kehidupan sehari-hari dalam masa berperang tidak mampu mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan. Kesulitan ini mengakibatkan pencabutan beberapa ikatan dinas. Sebagian dari mereka yang dicabut ikatan dinasnya ada yang melanjutkan pendidikan dengan biaya sendiri, sementara sebagian yang memerlukan pekerjaan diserahkan

dilimpahkan kepada Kementerian Perburuhan Jawatan Penempatan Tenaga.

Dipusatkannya penyaluran mantan pejuang demobilisan pada Jawatan Penempatan Tenaga membuat jumlah pencari kerja semakin banyak. Kondisi ini juga mempersulit para pencari kerja yang terdaftar pada tempat-tempat dengan rasio kesempatan kerja rendah seperti Yogyakarta. Untuk mengatasi hal ini maka penawaran kerja tidak hanya ditawarkan pada kota yang bersangkutan, melainkan ditawarkan pula pada Jawatan Penempatan Tenaga di kota-kota yang memiliki harapan yang sama dengan pencari kerja di tempat lain.

Untuk mempercepat penyaluran tenaga para mantan pejuang ke masyarakat, Kementerian Perburuhan Jawatan Penempatan Tenaga mengadakan sistem tenaga darurat. Instansi-instansi dapat meminta tenaga dari Kantor Penempatan Tenaga setempat untuk dipekerjakan sebagai tenaga darurat. Artinya sebagai pekerja harian yang dibayar oleh Jawatan Penempatan Tenaga. Pada perkembangannya, hal-hal yang berkaitan dengan mantan pejuang diurus oleh badan tersendiri yakni B.P.U.R. Namun, karena permasalahan ini dinilai tidak kunjung menemui kemajuan, dibentuklah dua instansi lagi, yakni B.R.N cabang dan Ins C.T.N.

Sebuah surat yang dikirim oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta selaku ketua B.P.U.R di wilayah Jogjakarta memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang pejuang yang ingin mendaftar sebagai mantan pejuang bersenjata. Adapun persyaratannya antara lain pejuang harus membuktikan diri dengan surat keterangan yang sah bahwa mereka ikut serta dalam perjuangan dengan menggunakan senjata pada aksi militer yang kedua. Surat keterangan tersebut harus ditandatangani oleh mantan pemimpinnya dan Pamong Praja. Setelah mendaftar, mantan pejuang tersebut dilatih untuk *nyambut gawe* (bekerja) agar mereka bisa beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat. Tabel di bawah memberikan gambaran jumlah mantan pejuang terdaftar yang diayomi pada tahun 1950an:

No.	Daerah	Pendidikan	Transmigrasi	Terserah	Modal Perusahaan
1	Gunung Kidul	426	24	94	897
2	Kulon Progo	177	26	41	586
3	Bantul	226	29	-	302
4	Sleman	155	53	1	246
5	Kota	76	8	3	170
6	Total	1060	140	141	2201

**Table 3.**  
**Data Pendaftaran Mantan Pejuang di Yogyakarta.**

Sumber: *Arsip PA VIII 06 no.569.*

Di Yogyakarta sendiri, sebanyak 1.060 orang mantan pejuang bersenjata diposkan dalam ranah pendidikan. Dari jumlah tersebut didapati sebanyak 15 orang memilih pendidikan di bidang pertanian, 97 orang memilih memilih sektor perindustrian, sedangkan 76 orang memilih untuk meneruskan belajar. Sementara sisanya menyatakan bersedia mengikuti keputusan pemerintah (terserah). Selain diposkan pada bidang pendidikan, sebanyak 140 orang memilih untuk ditransmigrasikan ke luar Jawa, sebanyak 2.201 orang disalurkan dalam perusahaan-perusahaan partikelir, dan sisanya sebanyak 141 orang menyatakan “terserah”.

Usaha untuk mengembalikan mantan pejuang ke dalam masyarakat juga menyangkut pemberian kemampuan *softskill*. Di Yogyakarta pada tahun 1955 sedikitnya terdapat 8 kursus yang diselenggarakan khusus bagi mantan pejuang. Kursus tersebut antara lain, kursus *Mercurius Nasional* yang bertempat di Jalan Sandilata 5 Yogyakarta. Sebuah kursus yang mempelajari masalah administrasi atau kursus pemegang buku mampu menampung mantan pejuang paling banyak 50 orang. Dana yang dikucurkan Pemerintah Daerah Yogyakarta untuk membiayai kursus ini sebesar Rp 222.000. Sementara kursus yang paling sedikit menampung mantan pejuang adalah kursus tukang jam dan reparasi. Masing-masing dari kursus ini menampung 10 orang. Selain itu, masih terdapat kursus lain untuk mantan pejuang yang bertempat di Yogyakarta, berikut tabelnya:

No.	Nama Kursus	Lama Pendidikan	Peserta	Biaya yang dihabiskan
1	Pemegang Buku/Administrasi	2 Tahun	50	Rp 222.000
2	Steno/Typen	1 Tahun	30	Rp 131.000
3	Kejuruan juru gambar/bangunan dan pemborong bangunan	3 Tahun	30	Rp 120.000
4	Sopir/Montir	1,5 Tahun	30	Rp 178.000
5	Kerajinan Kulit	15 Bulan	25	Rp 117.500
6	Reparasi Sepeda	6 Bulan	15	Rp 92.000
7	Reparasi Jam	1,5 Tahun	10	Rp 43.000
8	Barbir (Gunting Rambut)	6 Bulan	10	Rp 27.000

**Tabel 4.**  
**Data Pendidikan Kursus Bagi Mantan Pejuang**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1955.**

Sumber: *Arsip Pakualam VIII 06 763*

Kedelapan kursus tersebut dipusatkan di Kota Yogyakarta. Pihak yang berwenang sebagai penyelenggara adalah pemerintah yang bekerja sama dengan badan-badan lain di Yogyakarta seperti misalnya Jawatan P.P. & K Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara spesifik Jawatan P.P. & K Daerah

Istimewa Yogyakarta mengurus kursus Pemegang buku dan steno. Jawatan D.P.U mengurus kursus kejuruan juru gambar/bangunan dan pemborong bangunan. Sementara, kursus sopir, kerajinan kulit, reparasi sepeda, reparasi jam dan barbir diurus oleh Jawatan K.P.P.K Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setiap penyelenggaraan kursus menghabiskan biaya yang berbeza-beza. Perbezaan biaya yang dihabiskan ini didasarkan pada beberapa alasan antara lain; *pertama*, lamanya penyelenggaraan kursus yang berbeza antara kursus satu dengan kursus yang lain. *Kedua*, penyelenggaraan masing-masing kursus menuntut keperluan yang berbeza-beza pula.

Biaya yang dialokasikan untuk menyelenggarakan kursus-kursus ini digunakan untuk pembiayaan keperluan lain seperti: uang saku peserta kursus, alat tulis menulis, honorarium guru, pakaian atau sepatu, uang kesejahteraan, dan juga uang kesehatan di samping keperluan lain seperti sewa gedung dan peralatan-peralatan lain yang diperlukan untuk menunjang berlangsungnya kursus.

Untuk menyelenggarakan kursus administrasi/pemegang buku, pemerintah harus membayar sebanyak Rp 300 per bulan sebagai uang sewa sebuah gedung di Jalan Sandilata 5 Yogyakarta. Sementara untuk penyelenggaraan kursus gunting rambut yang terletak di tempat yang sama, pemerintah harus membayar uang sewa gedung Rp 200 untuk setiap bulannya. Selain itu ada pula uang makan sebesar Rp 225 per orang setiap bulannya. Uang ini belum termasuk uang kesejahteraan sebesar Rp 20 yang diberikan tiap bulan untuk setiap orang. Seorang mantan pejuang yang mengikuti kursus juga mendapatkan uang pakaian/sepatu sebesar Rp 250, biaya ini diasumsikan dapat membeli satu stel pakaian dan sepatu. Setiap mantan pejuang yang mengikuti kursus juga mendapatkan uang kesehatan sebesar Rp 20 setiap bulannya.

Di atas rangkaian kebijakan untuk menunjang kesejahteraan mantan pejuang, sebagian besar mantan pejuang menginginkan agar mereka mendapatkan kredit agar dapat mengusahakan pekerjaan sendiri. Rencana ini urung dilaksanakan karena kondisi keuangan negara yang masih sangat terbatas. Bagaimanapun, ihwal rasionalisasi jumlah tentara serta ihwal demobilisasi ini pada awalnya dirasakan sebagai sesuatu yang kurang menyenangkan bagi mantan pejuang yang mengalami kebijakan ini.

## Kesimpulan

Pengangguran Revolusi terjadi sebagai akibat dari perang revolusi yang berkecamuk di negeri Indonesia yang masih muda. Yogyakarta yang sempat menjadi ibukota negara menjadi destinasi arus pengungsi. Politik bumi hangus mengakibatkan sarana perusahaan-perusahaan rusak dan menimbulkan *Massa ontslag* hingga mengancam kesejahteraan para buruh. Kondisi sarana dan prasarana ekonomi yang porak poranda akibat perang,

ditambah dengan adanya arus pengungsi yang harus terjamin kebutuhan dasarnya, menjadikan pengangguran revolusi sebagai tugas besar bagi pemerintah.

Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan pengangguran revolusi dengan pembentukan jawatan kerja, pemberian sokongan penganggur dengan pelbagai syarat, dan ketentuan. Aturan-aturan ditetapkan guna menjaga agar kebijakan beserta alokasi yang dianggarkan dapat tepat pada sasaran. Selain untuk menunjukkan citra yang positif kepada rakyat di dalam bingkai negara yang baru merdeka, pelbagai kebijakan yang ditelurkan pemerintah khususnya dalam upaya mengatasi pengangguran revolusi bertujuan untuk mendapat dukungan rakyat.

Pemerintah juga memiliki kepentingan khusus terhadap kesejahteraan mantan pejuang. Di samping status mereka sebagai pahlawan, mereka juga merupakan elemen utama dalam tegak dan runtuhnya stabilitas keamanan dan pertahanan, baik sebagai pihak yang pro republik, maupun pemberontak. Khusus untuk mantan pejuang, diberikan berbagai kebijakan, seperti pembangunan asrama khusus mantan pejuang, kursus-kursus, pendidikan dan ikatan dinas, keutamaan untuk masuk ke angkatan ketentaraan, dan sebagainya.

Upaya dari pemerintah tersebut secara sepintas hendak menampilkan atau mewujudkan ambisi negeri yang *gemah ripah loh jinawi*, tidak ada pengangguran. Paling tidak pemerintah memiliki tekad untuk menjamin nasib warganya yang masih belum dapat mencukupi kebutuhan dasar hidupnya, kondisi yang disebabkan belum tersedianya pekerjaan yang layak. Model negara seperti ini dalam kacamata barat disebut dengan *welfare state*, di mana negara tidak sekadar menjadi penjaga malam (*nachtwaker staat*) namun juga menjamin tegaknya ketertiban di dalam negeri dan pertahanan serta keamanan.

## Referensi

### Buku, Jurnal, Karya Ilmiah

- Bambang Purwanto. "Conflict and Coexistence: Multicultural Images of Urban Yogyakarta in the First Half of Twentieth Century", *Coexistence or Juxtaposition*. Yogyakarta: Jurnal Jurusan Sastra Perancis FIB UGM.
- Bambang Purwanto. "In Search Of New Opportunities: The Indonesianisasi of Economic Life in Yogyakarta in the 1950s", dalam *Masyarakat Indonesia* Vol. 39, No. 2, Desember 2013, Jakarta: YOI, 2014.
- Djamal Marsudi, *et. al.* *Yogya Benteng Proklamasi*. Yogyakarta: Badan Musyawarah MUSEA, 1985.
- Duto Wijayanto. "Konflik, Kekerasan dan Kriminialitas di Ibukota Republik Indonesia Yogyakarta tahun 1945-1950". *Tesis*. Pascasarjana FIB UGM, 2011.
- Fryer, D. W. "Jogjakarta: Economic Development in an Indonesian City State"

- Economic Development and Cultural Change*, Vol. 7, No. 4 Juli, 1959.
- Ingleson, John. *Perkotaan, Masalah Sosial dan Perburuhan di Jawa Masa Kolonial*. Depok: Komunitas Bambu, 2013.
- Insan Kamil Wiratakusumah. *Djaminan Sosial*. Jakarta: PT Pembangunan, 1955.
- Kahin, George Mc.T, "The Crisis and Its Aftermath", *Far Eastern Survey*, Vol. 17, No. 22 Nov. 17, 1948.
- Kawamura, Chiyo Inui. "Peralihan Usaha dan Perubahan Sosial di Prawirotaman Yogyakarta 1950-1990an". *Tesis*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2004.
- Langgeng Sulisty Budi, "Permasalahan Sosial Perkotaan pada Periode Revolusi: Kriminalitas di Yogyakarta 1947-1948", *Lembaran Sejarah* Vol. 1, No. 2, 1997/1998.
- M. Nazir Salim. "Yogyakarta Memilih: Pemilihan Umum Anggota DPR Daerah 1951 di Yogyakarta". *Tesis*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2008.
- Malthus, Thomas, *et. al. Kependudukan: Dilemma dan Solusi*. Bandung: Nuansa, 2007.
- Modell, John dan Timothy Haggerty. "The Sosial Impact of the War", *Annual Review of Sociology* Vol. 17, 1991.
- Monfries, John. "The Sultan and The Revolution", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* Vol. 164, No. 2/3, 2008.
- Mutiah Amini, "Komunitas di Kota Santri: Politik Lokal Kotagede pada 1950-an—1960-an" dalam Sita Van Bemmelen & Remco Raben (peny.). *Antara Daerah dan Negara Indonesia Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- O'Malley, William Joseph. "Indonesia in the Great Depression: A Study of East Sumatra and Jogjakarta in the 1930's". *Thesis*. Cornell University, 1977.
- P. J. Suwarno. *Hamengku Buwana IX dan Sistem Birokrasi Yogyakarta 1942-1974 Sebuah Tinjauan Historis*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi, 2001.
- Selo Sumardjan. *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2009.
- Soetomo Martopradoto. *Persoalan Tenaga Manusia dan Pembangunan Indonesia*. Jakarta: Sari Pers, 1957.
- Thee Kian Wie. *Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*. Jakarta: Kompas, 2005.
- Umar Khayam. *Para Priyayi sebuah Novel*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1992.
- Van Zanden, Jan Luiten & Daan Marks. *Ekonomi Indonesia 1800—2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan*. Jakarta: Kompas, 2012.

### **Surat Kabar, Majalah**

- Harian Pagi Nasional*, 28 September 1950.
- Harian Pagi Nasional*, 9 Agustus 1950.
- Kedaulatan Rakyat*, 14 Februari 1950.
- Kedaulatan Rakyat*, 2 Maret 1951.
- Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari 1951.
- Kedaulatan Rakyat*, 4 Mei 1955.
- Kedaulatan Rakyat*, Januari 1947.
- Kedaulatan Rakyat*, Januari 1952.
- Minggu Pagi*, 18 Januari 1953.

*Penjebat Semangat*, 20 Februari 1954.  
*PERMATA*, 10 Mei 1951.  
*Tindjauan Masa'alah Perburuhan*, No. 1 Th. 2, 1 Mei 1950.  
*Tindjauan Masa'alah Perburuhan*, No. 1-2 Th. IV, Mei-Juni 1952.  
*Tindjauan Masa'alah Perburuhan*, No. 2-3 Tahun IV, Juni-Juli 1953.  
*Tindjauan Masa'alah Perburuhan*, No. 3 Th. II, 10 Juli 1950.  
*Tindjauan Masa'alah Perburuhan*, No. 5 Th. X, September 1958.

### **Arsip**

Arsip Kabinet Presiden RI No. 1508.  
Arsip Kementerian Penerangan No.155.  
Arsip Kementerian Sosial dan Perburuhan 1945-1950 No. 42.  
Arsip PA VIII 06 No. 569.  
Arsip PA VIII 06 No. 763  
Arsip PA VIII No. 1373.  
Arsip PA VIII No. 1632.  
Arsip PMRI No. 149.  
Arsip Sekretariat Negara Kabinet Perdana Menteri Th.1950-1959 No. 3023.  
Statistik Pemerintah Daerah Jogjakarta Tahun 1958.

### **Arsip Diterbitkan**

*Pengungsian Penduduk di Jawa tahun 1945-1949*, (Jakarta: ANRI, 2005).  
*Peraturan Perburuhan dan Peraturan Administrasi Perburuhan*, (Djakarta: Kementerian Perburuhan R.I, 1953).

### **Sumber Lisan**

Citaningsih Utaryo (85 th), Eks Tentara Pelajar, 5 Februari 2015.  
Halbirun (78 th), Eks Tentara Pelajar, 1 Maret 2015.  
Kunto Wibisono (80 th), Eks Tentara Pelajar, 3 Juni 2015.  
Wagiman (80 th), Eks Tentara Pelajar, 1 Maret 2015.